

Bergerak Menuju Jalan Seni *Jeprut*

Rahmat Jabaril

komunitastaboo@gmail.com

Abstrak

Jeprut adalah suatu kesadaran seniman untuk mengambil jarak dan mencari hal yang baru terhadap tatanan nilai dan tatanan sosial yang sudah ada. Kaum jepruter adalah seniman yang resah dan menolak sikap-sikap yang menerima apa adanya. Karena kalau menerima saja keadaan ia adalah kaum lemah, kaum ambigu, yang akan menjadi objek bagi kaum antroposentrisme yang menginginkan keseragaman bentuk seni. Jepruter tidak mau terjebak pada realitas yang mengikat, ia akan mencari bentuk seni baru yang tidak seragam. Sementara kaum antroposentrisme seni akan menuntut otentisitas dari bentuk-bentuk baru tersebut. Mereka mengacu pada tata nilai yang melembaga yang dikelola secara terpusat, agar pengawasannya lebih mudah untuk menstabilkan kekuatan dirinya. Kaum antroposentrisme akan menggunakan tangan negara yang juga sebagai perwakilan dari kekuatan kapitalisme. Kesadaran kreatif kaum jepruter selalu berhubungan dengan media baru yang akan memberikan warna lain pada bentuk-bentuk mainstream kesenian. Jepruter ingin meruntuhkan nilai-nilai seni yang sudah mapan, hal itu tercermin melalui aksi seni yang dilakukan Budi Raxsalam dan Tonny Brour pada tahun 1980an.

Keywords: Jeprut, seni mainstream, antroposentrisme, kapitalisme, formalisme.

Pendahuluan

Tanggung jawab seniman tidak bisa dinafikan dari kodratnya sebagai pembaharu, dan mau tidak mau dia harus tenggelam pada kedalaman dari hakekat berseninya. Melampaui batas yang tidak bisa dipungkirinya menjadi cahaya penerang bagi dirinya, maupun bagi publik. Namun tidaklah mudah untuk menembus tabir yang sesungguhnya. Seorang seniman ketika meraup kesadaran atas dirinya dan “kesemestaan” di luar dirinya, tentu akan merasakan realitas-sosial yang abstrak. Kepekaan terhadap potensi keabstrakan realitas tersebut, membuat seniman resah karena klaim realitas atas seni yang sudah mapan (*established*). Kegundahan seniman pada

“kematian seni” yang terjebak pada batasan bentuk itulah, membuat lahirnya kesadaran baru, dan “seni” harus terbebas dari tekanan komodifikasi maupun bentuk permanen. Dengan itu disematkan istilah “jeprut” untuk pembebasan atas kuasa seni. Kata “jeprut” tersebut merupakan bentuk seni yang bebas dari berbagai tekanan seni mainstream, sejarah seni dan psikologi seni itu sendiri.

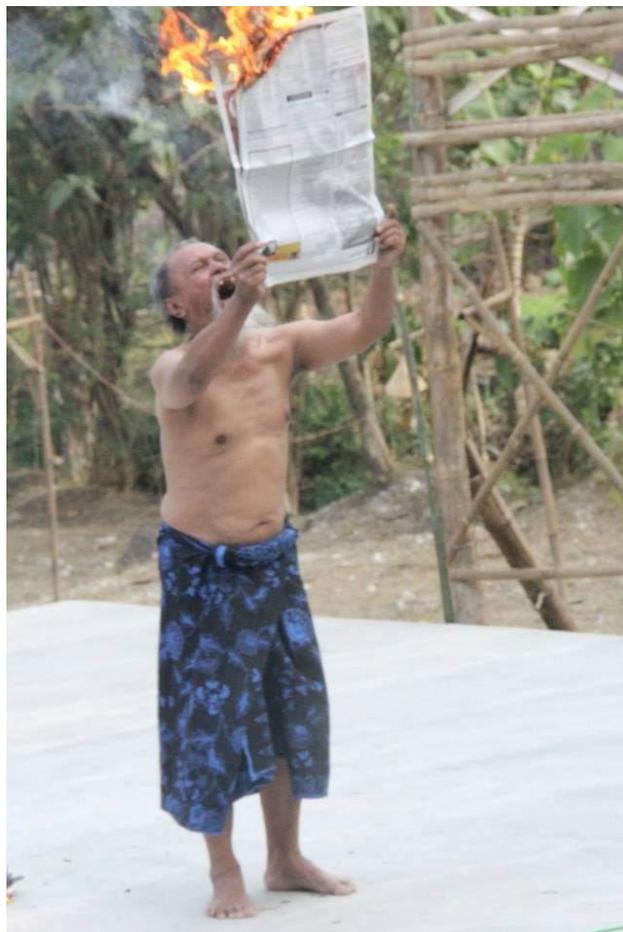
Apa itu seni jeprut

Pencarian bentuk baru atas pelanggaran tata nilai dalam kehidupan, merupakan tanggung jawab seniman yang sadar pada hakekat “kesemestaan”. Seniman mencapai penemuan diri, ketika dia sudah meraup pemahaman pada hakekat dirinya yang tidak absolut dan tidak terselubung. Seniman adalah manusia yang sadar atas keberadaan dirinya yang nyata pada realitas yang abstrak. Kehadiran “dirinya” itu berada di jagat alit maupun jagat besar. Ketika seniman melakukan penjarakan atas tata nilai yang dibakukan dalam “ruang kehidupan”, maka dia sedang menggali potensi jalan baru dalam kehidupannya.

Jalan baru dalam ruang imajinasinya seniman, berdampak pada wilayah dialektik antara tata nilai kehidupan (konsitusional) dan temuan nilai baru (inskonstitusional). Benturan bentuk pemikiran yang establish dan yang radikal itu, biasanya akan melahirkan bentuk “kesadaran baru”. Maka ketegangan itu berdampak pada bunyi “jeprut” (bunyi putus) dalam ruang tata laku sosial. Jeprut dalam penilaian orang Sunda sama dengan: “Putus” (berprilaku lain atau berlebihan dari tata nilai sosial yang ada), misalnya sekumpulan pemuda sedang menikmati tarian dangdut, tiba-tiba salah satu temannya tidak mau berhenti walau musiknya sudah selesai. Teman-temannya mengatakan: “*manehmah jeprut!*” (kamu jeprut!). Kata “jeprut” semacam pernyataan jastifikasi.

Jeprut dalam istilah pandangan Wawan S Husein (seniman Bandung): mempunyai dua pengertian suku kata berbeda asal bahasanya yang bersatu antara: Jeup (Bahasa Sunda) = diam dan *root* (Bahasa Inggris) = akar. Jadi “Jeprut” sama dengan akar yang diam. Dalam pengertian lain akar yang menumbuhkan kehidupan di muka bumi, merekonstruksi ulang pada tata nilai yang baru: Berhenti dan melakukan penjarakan pada hukum-hukum formal yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan lagi keberlanjutannya pada kehidupan. Orang yang selalu resah dengan ketimpangan sosial akibat hukum-hukum formal, hingga membuat jalan lain sebagai jalan hidupnya. Lalu membangun tata nilainya sendiri sebagai alat inspirasi untuk menjeda. Berhenti dalam keterlibatan dengan laku formalisme, mencari tata nilai kehidupan baru, dan lebih menggali substansi diri serta lainnya. Dalam istilah lain, menurut Anton Bakker dikatakannya sebagai transenden, dari kata latin *transc'endere*, yang berarti “pindah”, ”melewati” dan “melampaui” (Anton Bakker: 1995,187). Maka keresahan kaum jepruter akan menolak sikap-sikap “menerima apa adanya” yang selalu menjadi objek bagi kaum antroposentrisme.



Gambar 1 - Jepruter Wawan Husein di studio pelesungan Solo, 2014 (foto: Rahmat Jabaril)

Jepruter, kaum ambigu, dan kaum antroposentrisme

Pergeseran nilai peradaban selalu tidak luput dari sebuah keresahan, di mana para pelakunya berkaitan dengan proses “dialektika”, karena kodrat manusia sebagai makhluk pencuriga.

Kalau hanya menerima saja keadaan yang sudah mapan, maka ia hanya menjadi “kaum ambigu”, kaum lemah, yang sudah puas dengan hanya menikmati sistem yang ada. Ia dengan senang hati (pragmatisme) memburu kebutuhan sandang, papan dan pangan, yang menjadi satu-satunya tujuan.



Gambar 2 - Pameran artefak karya-karya para jepruter Bandung setelah aksi jeprut 2014 di Bandung (foto: Rahmat Jabaril)

Bagi “kaum ambigu” perputaran waktu merupakan tenaga yang cukup untuk bisa menenteramkan atau juga menegangkan. Namun tidak sebaliknya, sebagai manusia yang mempertanyakan dirinya “siapakah aku?”, sebagai jelmaan dalam hidupnya. Kesadaran kritis, mempertanyakan diri sendiri seperti telah diabaikan. Karena desakan yang bombastis dari kelompok “antroposentrisme” itu sebagai kekuatan yang menjelmakan waktu dalam kehidupannya. Semua yang berhubungan dengan temuan para ilmuwan atau para jepruter (seniman) selalu akan ditarik pada bentuk pemetaan penyeragaman. Karena akan memudahkan dalam menentukan kekuasaan “antroposentrisme” itu.



Gambar 3 - Seni Jeprut“ Wail, Geliat Tubuh di Hutan Kota” di Hutan Kota Babakan Siliwangi: Seni Jeprut “Peluru Kata, Penghilangan Paksa” di Sanggar Olah Seni-Bandung, 2022 (foto: Koleksi Rahmat Jabaril).

Namun penulis melihat perkembangannya ketika dunia pencarian atas kesadaran manusia (manusia kodrati sebagai makhluk pencuriga) telah terlembagakan, maka kekuasaan otonom dari keseniman atau dunia keilmuan bisa terkebiri, karena kepentingan kekuasaan kelembagaan tersebut. Pada tataran itulah kodrat keseniman menjadi model yang terseragamkan dalam citraannya. Dalam konteks tersebut hakekat keilmuan dan keseniman menjadi bias. Di situlah tempatnya dunia keilmuan dan keseniman secara sosial masuk dalam ranah kelompok “kaum ambigu”. Padahal pada hakekatnya, kodrati pencuriga -- sebagaimana dikatakan Husserl dalam pemikiran filsafat radikalnya -- pemikir sepantasnya menempatkan dirinya berada dalam penguasaan penuh. Demi menyibak “sumber” atau “realitasnya sendiri”, menuntut sebuah pengarah langsung kesadaran kepada objeknya, tanpa mediasi apapun dan “harus bebas dari segala macam prasangka”. (Donny Garhal Adian, 2010:27). Kesadaran seniman (jepruter) sesungguhnya tidak terbatas pada hukum-hukum yang mentautkan dirinya pada realitas yang mengikat. Dia bebas berselancar di kesemestaan jagatnya yang “merdeka”:

seorang “jepruter” akan mampu melihat dua alam, alam banalisme dan alam realitas kebenarannya.

Maka sebagai (seniman) Jepruter yang sesungguhnya, harus bisa memberikan penerangan jiwa bagi diri dan orang lainnya, yaitu jiwa substansi kosmis, memiliki diri dalam otonominya (Anton Bakker, 186). “Kesadaran dalam aspek ruang diri dan ruang publik”, maka pengayoman dalam menata keberlanjutan hidup semuanya (ruang diri dan ruang publik), seniman akan selalu menghadirkan percikan cahaya yang melahirkan sebuah fenomena. Percikan yang dilahirkan karena sebuah proses dialektik yang intens. Kesadaran penuh seniman atau ilmuwan pada substansi kosmis, membuat mereka tidak bergeming dengan kehadiran konstitusi yang mengawasinya. Bagi sang seniman, konstitusi atau aturan tata nilai, akan dibangun-hidupkan pada tata nilai baru sebagai konsekwensi keahliannya.

Kehadiran nilai baru, mungkin bisa dianggap sebagai sebuah fenomena yang memungkinkan kehadiran bentuk baru di mata publik. Kehadiran bentuk baru sebagai representasi kedaulatan sang (seniman) jepruter itu akan membuat nilai sementara yang inkonstitusional. Pada kehadiran sementara tersebut, biasanya tidak menjadi lekas sebagai perwujudan tata nilai, melainkan nilai yang akan menjadi cikal bakal kelahiran tata nilai baru. Namun tidaklah mudah tentunya, jika kelompok “antroposentrisme” masih mengidamkan tata nilai yang ada. Karena mereka lebih mengutamakan soal kenyamanan. Di titik itulah terjadi ketegangan sebagai bentuk dialektik bagi kedua belah pihak, antara seniman dan kelompok “antroposentrisme”. Sementara kelompok “kaum ambigu” posisinya tergantung pada kemenangan sementara, karena bagi kelompok tersebut yang penting adalah kebahagiaan dan derita yang tidak dirasakan.

Sakit yang tidak terasa dan kegundahan jepruter

Temuan-temuan estetik seniman, menjadi hal penting untuk keberlanjutan tata nilai kehidupan. Bagi banyak orang koalisi permanen dalam penentuan hidup yang sudah baku, bahkan termaktub dalam konstelasi struktural maupun kultural. Baik yang sudah masuk secara absolut dalam kelembagaan maupun masyarakat luas, merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat.

Secara kultural ruang sosial yang “menghidup” itu merupakan otentisitas yang membangun semangat mereka, bahkan bagi masyarakat “kaum mapan” hal itu menjadikan jalan hidup yang sesungguhnya. Otentisitas seolah menjadi harga mati, tidaklah menjadi pemicu ulang dalam menelusuri kembali kebenaran faktanya dilahirkan. Sehingga klaim-klaim kebenaran menjadi jantung kehidupan keseharian. Karena itu konsekuensi pertama dan yang paling utama adalah pertanyaan atau klaim otentisitas status epistemisnya (Jozef Niznik,2002:17).

Kekuasaan penuh kelompok “antroposentrisme” itu akan menjaga kestabilan kekuasaannya dengan cara mengintervensi semua kelembagaan. Bahkan mereka menciptakan kebudayaan modern sebagai keadaan yang terikat dalam kelembagaan. Jika struktur sosial sudah mengacu pada tata nilai yang melembaga, maka pengawasannya akan lebih mudah untuk menstabilkan kekuatan kerajaan “antroposentrisme”. Kekuatan tersebut mencerabut akar dari hakekat kemanusiaan, dan mereka menciptakan doktrin baru yang disepakati oleh kekuasaan Negara (sebagai ruang publik). “Eksperimen” kontemporer mengikuti pola umum ini, ketika mereka mengambil bentuk “sosialisme bagi yang kaya”. Dalam sistem market korporasi global di mana “perdagangan” pada dasarnya berarti transaksi yang dikelola secara terpusat (Noam Chomsky, 2005:25).



Gambar 4 - Seni Jeprut “Wail, geliat tubuh berkepala anjing” di Sanggar Olah Seni Bandung, 2022 (Foto: Koleksi Rahmat Jabaril).

Bahkan kekuasaan “antroposentrisme” mendukung kebijakan publik yang dikelola Negara. Banyak ruang publik yang tidak lagi mempublik, bahkan peraturan-peraturan Negara menjadi berpihak pada kepentingan korporasi “antroposentrisme”. Hal itu didasarkan pada pengalaman penulis ketika mengadvokasi kebijakan Negara. Di tahun 2005 Pemerintah Kota Bandung merevisi Peraturan Daerah (PERDA) No.2 menjadi No.3 Tentang Tata Ruang Wilayah, di mana terjadi perubahan pada pasal 100 ayat A. Ketetapan tentang Kawasan Punclut yang tidak boleh ada akses jalan menuju Kabupaten (bunyi pasal sebelumnya) kemudian diubah pada ayat A. Di kawasan Punclut diperbolehkan adanya akses jalan menuju Kabupaten Bandung Barat. Bunyi pasal tersebut telah membuka kesempatan para pengusaha untuk melebarkan pembangunannya sesuai kepentingannya. Sementara kawasan tersebut merupakan kawasan tangkapan air hujan dan kawasan penghijauan. Pada akhirnya pupuslah ruang hijau terbuka untuk masyarakat Kota Bandung. Demikianlah, banyak lagi PERDA atau Undang-Undang yang melegitimasi kepentingan kaum “antroposentrisme”.



Gambar 5 - Seni Jeprut “Berkuda”, mempertanyakan PERDA (Peraturan Daerah) tentang Kawasan Bandung Utara ke DPRD-Jawa Barat, 2014 (foto: Dokumentasi Rahmat Jabaril).

Kesadaran pencarian bentuk baru dalam tatanan nilai, akan selalu bertabrakan pada kepentingan formalisme, di mana hukum sudah menjadi alat kekuasaan kaum “antroposentrisme”. Ketentuan-ketentuan dibangun untuk mengikat sehingga menjadi tidak terbantahkan, padahal aturan tersebut menjadi hulu kehidupan manusia. Kebebasan pencarian kemudian akan terikat pada aturan yang sudah menjadi ketentuan kekuasaan “antroposentrisme”. Maka kodrat manusia sebagai makhluk pencuriga lepas dari dirinya. Lingkungan sosial terjemakan menjadi kekuasaan lembaga akibatnya budaya humanisme serta nafas kerakyatan menjadi pupus, daulat demokrasi hilang. Memang demokrasi sedang terancam di mana-mana, termasuk di negara-negara industri terkemuka. Setidaknya demokrasi dalam pengertian sejatinya, yang berarti kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dirinya. (Noam Chomsky, 2005:85).



Gambar 6 - Seni Jeprut “Menggugat DPRD-Jawa Barat berdasar PERDA KBU”, 2014 (foto: Koleksi Rahmat Jabaril).

Seni jeprut membangun Jalan Seni Baru

Kesadaran akan totalitas dan pemahaman atas pelanggaran “nilai-nilai kehidupan” merupakan hal inkonstitusional yang akan menjadi ukuran bagi jepruter. “Pelanggaran jiwa kemanusiaan” merupakan pemicu kesadaran kreatif yang keberlanjutan. Namun kesadaran kreatif itu tidak dianggap jika didasarkan pada ketentuan-ketentuan formalisme. Karena kesadaran kreatif bagi kaum jepruter, selalu berhubungan dengan media baru. Media baru merupakan kesatuan antara jiwa, teknik dan intensitas, yang membuka jalan baru terciptanya inspirasi. Hal itu berdampak juga pada luaran sosial baru. Seperti yang sudah dibahas pada awal tulisan ini, bahwa “menjeprut” itu adalah melakukan penjarakan, untuk kemudian membangun jalan lain dari ruang lingkup tata nilai yang ada. Karena telah menjadi masalah besar bahwa kita semua tidak bisa melepaskan diri dari ikatan material sejarah yang diciptakan oleh para pemenang kehidupan, yaitu kaum kapitalis. Karena kapitalisme yang menguasai hampir seluruh material yang kita gunakan di dalam hidup sehari-hari. Material yang telah dikembangkan dalam kehidupan generasi sekarang. Tetapi dengan seluruh keadaan ini, apakah kemanusiaan telah menjadi maju? (William Raeper: 2000, 254).



Gambar 7 - Seni Jeprut “Berdoa di Sungai Bengawan Solo”, 2014 (foto: Rahmat Jabaril).

Pengukuhan atas nama kedaulatan estetika yang didominasi dan dikuasai oleh kaum “antroposentrisme seni”, telah menjadikan landasan keresahan bagi seorang “jepruter”. Untuk itu gerakan seni jeprut akan memberikan warna lain pada bentuk-bentuk mainstream kesenian. Bagi kaum “jepruter” tujuan untuk meruntuhkan nilai-nilai seni yang mapan merupakan landasan kerja kreatifnya. Bagi seorang “jepruter”, ketidakadilan yang diakibatkan oleh manipulasi demokrasi telah menjadi landasan keresahannya. Maka tidaklah heran jika di Bandung para seniman “jeprut” melakukan aksi-aksi seninya mewakili masyarakat tertindas, sekaligus menunjukkan pada kaum “antroposentrisme seni”, bahwa seni itu tidak terbatas. Penggempuran yang dilakukan “seni jeprut” menyorot pada dua arah, yaitu pada kebijakan Negara, dan pada singgasana seni kemapanan. “Seni jeprut” akan membentuk ruang ketiga, dimana publik bisa merasakan langsung manfaatnya.

Kehadiran “Seni Jeprut” diawali pada tahun 1980-an, dengan mengusung keresahan pada realitas sosial seni dewasa itu. Salah satu tokoh “jepruter” ketika itu adalah Budi Raxsalam, yang cukup fenomenal karena dianggap “gila” atas dasar imajinasinya yang liar. Sehingga publik menganggapnya sebagai orang yang tidak kompromi dengan realitas sosial. Pada zaman itu Budi banyak mengeksplorasi seni kolase sebagai keseharian berkaryanya. Begitu juga dengan Tonny Brour pada tahun 1989-1990, yang memperkenalkan publik dengan teater tubuhnya di sekitar Jalan Naripan-Bandung. Puncak ramainya gerakan “Seni Jeprut” adalah tahun 1996, saat merespon kasus Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK-Bandung), di jalan Naripan No. 7-9, Bandung dengan P.D. Kertawisata Jawa Barat. Di mana Gedung Kesenian tersebut mau diambil alih menjadi kantornya P.D. Kertawisata. Melalui gerakan “Seni Jeprut” itulah akhirnya gedung YPK dikembalikan fungsinya menjadi Gedung Pusat Kebudayaan (YPK). Sejak itulah “Seni Jeprut” dikenal publik secara lebih luas. Dan peristiwa itu telah memperlihatkan eksistensi “Seni Jeprut” sebagai alternatif penyeimbang atas kebijakan Negara maupun dan perlawanan terhadap bentuk seni yang established.

Daftar Rujukan

Adian, Donny Grahal (2010). *Fenomenologi*. Depok: Penerbit Koekoesan.

Chomsky, Naom (2005). *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tantangan Global*. Jakarta: IKAPI.

Hardjadibrata, R.R. (2003). *Sundanese English Dictionary*. Bandung: Kiblat.

Linda Smith, Linda dan Raeper, William (2000). *Ide-ide*. Yogyakarta: Kanisius.